

RINGKASAN

RIFA FADLILAH, Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Penyesuaian Status Yayasan, Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Budiyo, S.H, M.Hum. dan anggota : Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara *yuridis normatif*. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tipe penelitian yang dipergunakan adalah termasuk penelitian *preskriptif*. Sumber data utama diperoleh dari penelitian data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisa *normatif kualitatif*.

Yayasan diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2001. Yayasan yang telah ada sebelum undang-undang ini wajib melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan undang-undang yayasan guna tetap diakui sebagai badan hukum. Namun kenyataannya banyak permasalahan yang timbul yaitu tidak dapatnya sebuah yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya karena daluarsa waktu. Notaris sebagai pejabat umum yang berperan sebagai pihak yang dapat membantu menyesuaikan anggaran dasar yayasan ternyata tidak luput dari masalah yang timbul akibat dari penyesuaian anggaran dasar tersebut. Salah satu masalahnya adalah dianggap melakukan pemalsuan terhadap akta perubahan anggaran dasar.

Hasil penelitian dalam pertimbangan hakim memutus perkara pemalsuan akta otentik telah berdasar kepada unsur-unsur yang ada dalam pasal 264 KUHP, namun hal tersebut dirasa kurang tepat karena hanya berdasar pada ketentuan yang ada dalam KUHP saja, seharusnya hakim juga melakukan pertimbangan dengan melihat ketentuan yang ada dalam undang-undang jabatan notaris. Status yayasan yang tidak dapat menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan pasal 71 undang-undang yayasan tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan nama yayasannya dan juga tidak diakui sebagai badan hukum dan dapat diminta pembubarannya berdasar putusan pengadilan atau atas dasar permintaan para pengurusnya.

Kata kunci: Pemalsuan Akta Otentik, Yayasan, Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan.

SUMMARY

RIFA FADLILAH, Notary Masters Program, Faculty of Law, University of Jenderal Soedirman University, The Criminal Act of Falsification Authentic Deeds by Notaries in Adjusting the Status of the Foundation, Advisory Commission, Chairperson: Dr. Budiyo, S.H, M.Hum and member: Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

This study uses normative juridical research methods. The method used is the statutory approach and the conceptual approach. The type of research used is prescriptive research. The main data source was obtained from secondary data research supported by primary data. The location of this research was conducted in Banyumas Regency. The data obtained were analyzed using qualitative normative analysis.

Foundations are regulated in Law number 16 of 2001. Foundations that existed before this law are obliged to make adjustments to the articles of association in accordance with the provisions of the foundation law to remain active as legal entities. However, in fact there are many problems that arise, namely the inability of a foundation to adjust its articles of association due to time expiration. Notary as a public official who acts as a party who can help adjust the articles of association of the foundation is not free from problems that arise as a result of the articles of association. One of the answers is to fabricate the deed of amendment to the articles of association.

The results of the research in the consideration of the judge deciding the case of authentic deed forgery have been based on the elements in Article 264 of the Criminal Code, but this is deemed inappropriate because it is only based on the provisions contained in the Criminal Code, the judge should also make considerations by looking at the existing provisions. in the notary position law. The status of a foundation that cannot adjust the basic schedule in accordance with the provisions of Article 71 of the law of a foundation cannot use the word foundation in front of the name of the foundation nor is the foundation recognized as a legal entity and can be asked to dissolve it based on a court decision or at the request of its management.

Keywords: *Authentic Deed Falsification, Foundation, Foundation Articles of Association Adjustment.*